



## RINGKASAN

ILYAS RAMADHAN. Tinjauan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran. *An Overview of Collection of Transfer Fees for Motorized Vehicles at the Regional Revenue Management Center of Pangandaran Regency.* Dibimbing oleh RAHMAT SALEH.

Sumber pendapatan di daerah yang potensial yaitu penerimaan pajak daerah, yang memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan daerah salah satunya berasal dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemungutannya dikenakan kepada wajib pajak dan badan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pajak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menguraikan alur mekanisme pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, menguraikan pencatatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta menguraikan menguraikan penerimaan dan kontribusi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini disesuaikan dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan penulis di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran pada Bagian Ruang Kontrol tanggal 8 februari – 3april 2021. Metode pengambilan data yang digunakan dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah suatu lembaga dari Pemerintah Daerah yang telah menempuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut , hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Jawatan Perpajak dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat yang mempunyai salah satu fungsi tugas pemerintah dalam menghimpun, mencari sumber dana guna memenuhi pembiayaan dalam rangka kegiatan pemerintah Pajak Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci : Sumber Pendapatan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.